

**PENGARUH PERTUMBUHAN EKONOMI, INDEKS PEMBANGUNAN
MANUSIA, DAN KEBIJAKAN PEMERINTAH TERHADAP
KEMISKINAN DI SUMATERA BARAT**

SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Salah Satu Persyaratan untuk Memperoleh Gelar Sarjana (SI)
kepada Jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang*



Oleh :
FAREL PRATAMA PUTRA
2017/17060015

**JURUSAN ILMU EKONOMI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
2021**

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

PENGARUH PERTUMBUHAN EKONOMI, INDEKS
PEMBANGUNAN DAN KEBIJAKAN PEMERINTAH
TERHADAP KEMISKINAN DI SUMATERA BARAT

Nama : Farel Pratama
Putra NIM/TM :
17060015/2017
Jurusan : Ilmu Ekonomi
Keahlian : Perencana
Pembangunan Fakultas :
Ekonomi

Padang, 11 April 2022

Mengetahui:

Ketua Jurusan Ilmu Ekonomi



Melti Roza Adry, SE, ME

NIP. 19830505 200604 2 001
1 001

Disetujui Oleh

Pembimbing



Drs. Alianis, MS

NIP. 19591129 198602

HALAMAN PENGESAHAN LULUS UJIAN SKRIPSI


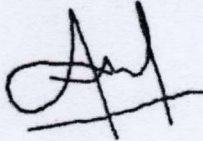
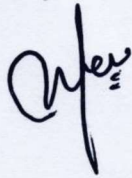
*Dinyatakan Lulus Setelah Dipertahankan di Depan Tim Penguji Skripsi Jurusan
Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi
Universitas Negeri Padang*

**PENGARUH PERTUMBUHAN EKONOMI, INDEKS PEMBANGUNAN
DAN KEBIJAKAN PEMERINTAH TERHADAP KEMISKINAN DI
SUMATERA BARAT**

**Nama : Farel Pratama Putra
NIM/TM : 17060015/2017
Jurusan : Ilmu Ekonomi
Keahlian : Perencana Pembangunan
Fakultas : Ekonomi**

Padang, Januari 2022

Tim Penguji :

No	Jabatan	Nama	Tanda Tangan
1	Ketua	: Drs. Alianis, Ms	
2	Anggota	: Ariusni, SE, M.Si	
3	Anggota	: Mike Triani, SE MM	

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Farel Pratama Putra
Nim/Th. Masuk : 2017/17060015
Tempat / Tanggal Lahir : Sumedang / 24 Oktober 1999
Jurusan : Ekonomi Pembangunan
Keahlian : Perencanaan Pembangunan
Fakultas : Ekonomi
Alamat : Sumedang Kenagarian Nyiur melambai

No. Hp/Telephone : 082283396310
Judul Skripsi Kp Terendam : Pengaruh Pertumbuhan ekonomi, Indeks Pembangunan Manusia dan Kebijakan Pemerintah Terhadap Kemiskinan di Sumatera Barat

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Karya tulis/skripsi ini adalah hasil dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik (sarjana) baik di UNP maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis/ skripsi ini murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan tim pembimbing
3. Pada karya tulis / skripsi ini terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau di publikasikan orang lain kecuali tertulis dengan jelas dicantumkan daftar pustaka.
4. Karya tulis / skripsi ini **Sah** apabila telah ditandatangani **asli** oleh tim pembimbing, tim penguji dan ketua program Studi.

Demikian lah pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran di dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar akademik yang telah diperoleh karena karyatulis / skripsi ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi.



Farel Pratama Putra
NIM : 17060015

ABSTRAK

Farel Pratama Putra : Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Indeks Pembangunan Manusia, dan Kebijakan Pemerintah Terhadap Kemiskinan di Sumatera Barat, di bawah bimbingan Bapak Drs. Alianis MS

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui (1) pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap kemiskinan di Sumatera Barat (2) pengaruh indeks pembangunan manusia terhadap kemiskinan di Sumatera Barat (3) pengaruh kebijakan pemerintah terhadap kemiskinan di Sumatera Barat.

Jenis penelitian ini adalah deskriptif dan asosiatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder Sumatera Barat dalam bentuk data panel dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 dan data ini diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) Sumatera Barat.

Jenis penelitian ini adalah deskriptif dan asosiatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder Indonesia dalam bentuk data panel dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 dan data ini diperoleh dari lembaga resmi Kementerian Keuangan dan Badan Pusat Statistik. Metode yang digunakan analisis regresi data panel yang diolah dengan menggunakan Eviews.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan di Kabupaten/Kota Sumatera Barat dengan probabilitas $0,0008 < \alpha = 0,05$, Indeks Pembangunan Manusia berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan di Kabupaten/Kota Sumatera Barat dengan Probabilitas $0,0000 < \alpha = 0,05$, Kebijakan Pemerintah (BANSOS PIP) berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kemiskinan di Kabupaten/Kota Sumatera Barat. Dengan Probabilitas $0,1227 \geq \alpha = 0,05$.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, pemerintah sebagai pemegang kendali atas jalannya suatu sistem pemerintahan di suatu negara, yang pada tujuan akhirnya untuk mendorong perekonomian harus menjaga dan mengelola kebijakan dan pemerintahan dengan seimbang dan berkesinambungan untuk mencapai perekonomian yang baik dan stabil agar dapat meminimalisir terjadinya kemiskinan di provinsi Sumatera Barat.

Kata Kunci: *Pertumbuhan Ekonomi, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Kebijakan Pemerintah, Kemiskinan*

KATA PENGANTAR



Puji dan syukur hanya untuk Allah SWT yang telah memberikan nikmat yang begitu banyak terhadap hamba-Nya serta shalawat untuk nabi Muhammad SAW. Dengan rahmat dan izin Allah sehingga peneliti mampu menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Indeks Pembangunan Manusia, Dan Kebijakan Pemerintah Terhadap Kemiskinan di Sumatera Barat”.

Penulis menyadari bahwa dalam proses penulisan skripsi ini banyak mengalami kendala, namun berkat bantuan, bimbingan, kerjasama dari berbagai pihak dan berkah dari Allah SWT sehingga kendala-kendala yang dihadapi tersebut diatas dapat teratasi. Untuk itu penulis menyampaikan ucapan terimakasih dan penghargaan kepada Bapak Drs. Alianis MS selaku pembimbing penulis yang telah sabar, tekun, dan ikhlas meluangkan waktu, tenaga dan pikiran memberikan bimbingan, motivasi, arahan, dan saran-saran yang sangat berharga kepada penulis selama menyusun skripsi.

Selanjutnya ucapan terima kasih penulis sampaikan pula kepada:

1. Teristimewa orang tua tercinta Ayah (Riza Hermanto) dan Ibu (Pevi Yetmi) yang selalu memberikan doa terbaik untuk anaknya. Teruntuk Wanita terhebatku Ibu, Terimakasih atas segalanya telah mendidik dan membesarkanku sampai sekarang dan Ayah terima kasih atas kasih dan sayang mu. Aku sayang ibu dan Ayah.
2. Untuk kakak dan adik ku semua ini untuk kalian, apapun yang saya lakukan untuk membahagikan kalian. Terima kasih
3. Untuk Keluarga Besar ku Terima Kasih sudah mendukung sampai ke tahap ini.
4. Bapak Dr. Idris, MSi selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
5. Ibu Melti Roza Adry, SE, ME selaku ketua jurusan Ilmu Ekonomi Universitas Negeri Padang dan Ibu Dewi Zaini Putri S.E M.M selaku sekretaris jurusan Ilmu Ekonomi Universitas Negeri Padang.
6. Bapak Drs. Alianis Ms selaku Pembimbing yang telah memberikan bimbingan, arahan, motivasi dan penuh sabar mendengar keluhan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. serta penguji Ibuk Ariusni SE. M. Si dan Ibuk Mike Triani, SE. MM
7. Bapak dan Ibu Dosen Jurusan Ilmu Ekonomi yang telah memberi bekal ilmu pengetahuan dan motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan studi serta penulisan skripsi ini.
8. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi yang telah meluangkan banyak waktu dalam memberikan ilmu tentang soft skill, organisasi, dan bantuan moral, material sehingga penulis dapat menyelesaikan studi dalam penulisan skripsi ini.
9. Bapak dan Ibu Staf Tata Usaha dan Staf Perpustakaan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.

Padang, Agustus 2021

Farel Pratama Putra

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	14
C. Tujuan Penelitian.....	14
BAB II KAJIAN TEORI, KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS	16
A. Kajian Teori	16
1. Kemiskinan.....	16
2. Pertumbuhan Ekonomi Dan Kemiskinan.....	20
3. Indeks Pembangunan Manusia Dan Kemiskinan.....	25
4. Kebijakan Pemerintah Mengenai Kemiskinan	27
B. Penelitian Terdahulu	30
C. Kerangka Konseptual.....	42
D. Hipotesis.....	43
BAB III METODE PENELITIAN	46
A. Jenis Penelitian.....	46
C. Jenis dan Sumber Data.....	46
D. Variabel Penelitian.....	47
E. Devinisi Operasional Variabel	47
F. Model Penelitian.....	49
g. Metode Estimasi Model Regresi Panel.....	50
b. Pengujian Hipotesis	56
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	57
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	81
A. Kesimpulan	81

B. Saran.....	82
DAFTAR PUSTAKA.....	83

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Perbedaan Penelitian	35
Tabel 3.1 Hipotesis Uji Autokorelasi.....	50
Tabel 4.1 Data jumlah penduduk miskin di provinsi Sumatera Barat tahun 2015-2019.....	56
Tabel 4.2 Data produk domestik regional bruto (PDRB) di provinsi Sumatera Barat tahun 2015-2019	60
Tabel 4.3 Data IPM, rata-rata lama sekolah di provinsi Sumatera Barat tahun 2015-2019.....	63
Tabel 4.4 Data bantuan sosial (BANSOS) di Sumatera Barat tahun 2015-2019 ...	67

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Jumlah penduduk miskin di Sumatera Barat tahun 2015-2019 dalam satuan persen.....	3
Gambar 1.2 Laju pertumbuhan Sumatera Barat tahun 2015-2019	6
Gambar 1.3 IPM Sumatera Barat Tahun 2015- 2019	9
Gambar 1.4 Persentase Rumah tangga Penerima BANSOS PIP (Program Indonesia Pintar) Kabupaten/Kota di Sumatera Barat tahun 2015-2019	11
Gambar 2. 1 Kerangka Konseptual	39
Gambar 4.1 Uji chow	70
Gambar 4.2 Uji Hausman.....	71
Gambar 4.3 Uji Lagrange Multiplier	73
Gambar 4.4 Uji Regresi Panel.....	74

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kemiskinan merupakan salah satu keanehan yang terjadi selama ini di Indonesia, karena kemelaratan di Indonesia sampai saat ini belum memiliki prosedur yang solid dari otoritas publik untuk pengentasan kemiskinan yang tepat bagi individu Indonesia yang berpihak pada orang miskin. Indonesia merupakan negara berkembang dengan jumlah total populasi sekitar 260 juta penduduk. Indonesia adalah negara berpenduduk terpadat nomor empat di dunia setelah China, India, dan Amerika. Banyaknya jumlah penduduk memiliki pengaruh terhadap berbagai masalah sosial maupun ekonomi negara, diantaranya yaitu tingkat kemiskinan. Kemiskinan yaitu ketidakmampuan secara ekonomi dalam memenuhi standar hidup rata-rata masyarakat disuatu wilayah atau daerah. Ketidakmampuan ini yaitu dalam memenuhi kebutuhan pokok seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, kesehatan dan pendidikan. Sebagai negara yang sedang berkembang, Indonesia menghadapi permasalahan kemiskinan yang merupakan permasalahan pokok yang harus diperhatikan pemerintah.

Tiga penyebab terjadinya kemiskinan dipandang dari sisi ekonomi, yaitu pertama kemiskinan muncul karena adanya ketidaksamaan pola kepemilikan sumber daya yang menimbulkan distribusi pendapatan yang timpang. Kedua, kemiskinan muncul akibat perbedaan dalam sumber daya manusia, kualitas sumber daya manusia yang rendah berarti produktivitasnya

rendah yang pada gilirannya tingkat upahnya rendah. Ketiga, kemiskinan muncul akibat perbedaan akses dalam kepemilikan modal. Dimana ketiga penyebab kemiskinan tersebut bermuara pada teori lingkaran setan kemiskinan (vicious cycle poverty). (Agustina et al., 2019)

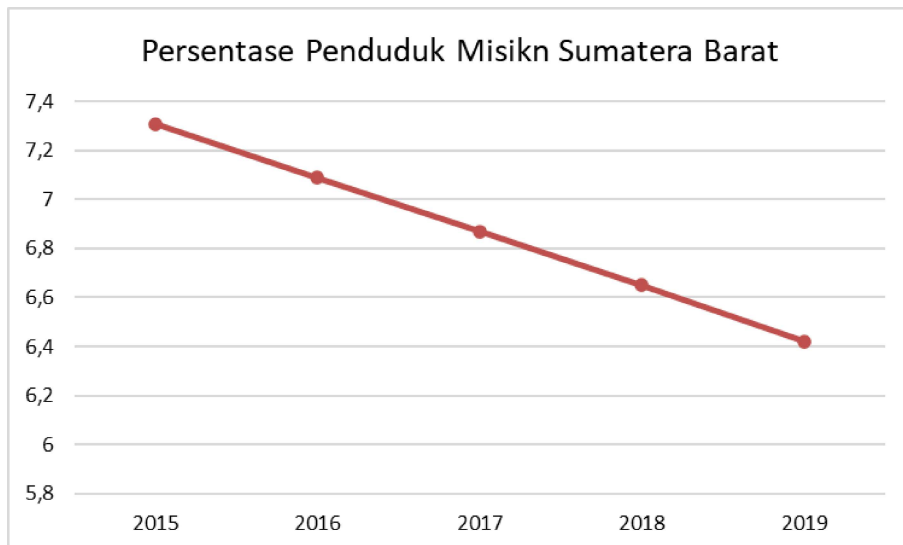
Kebutuhan ditandai sebagai tidak adanya kemakmuran, dan terdiri dari banyak aspek. Itu termasuk upah rendah dan kegagalan untuk mendapatkan tenaga kerja dan produk penting yang diharapkan akan dihasilkan dengan tenang. Kebutuhan juga mencakup tingkat kesehatan dan pelatihan yang rendah, akses yang bermanfaat untuk air bersih dan desinfeksi, keamanan yang tidak memadai, tidak adanya suara, dan batas yang tidak memadai dan pintu terbuka untuk kehidupan yang lebih baik. (Ranbir Singh, 2012)

Perbaikan adalah suatu proses kemajuan menuju arah yang unggul dan gigih untuk mencapai tujuan memahami budaya Indonesia yang sederhana, agresif, maju, dan sejahtera dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemajuan harus dikoordinasikan sehingga setiap tahap bergerak menuju tujuan. Menurut Saktyanu K (2003), Pemajuan harus dilakukan secara terkoordinasi dan sesuai dengan kebutuhan dan kebutuhan setiap kabupaten dengan tujuan perbaikan publik yang telah ditetapkan sejak lama dan saat ini. Oleh karena itu, salah satu tanda utama tercapainya perbaikan publik adalah berkurangnya jumlah penduduk miskin. Keberlanjutan dalam mengurangi jumlah orang miskin adalah prinsip pengembangan dalam memilih sistem atau instrumen perbaikan. Ini menyiratkan bahwa salah satu keputusan mendasar

dari area aksentuasi atau pilar kemajuan publik adalah kecukupan dalam mengurangi jumlah orang miskin. (Simatupang, 2003)

Kemiskinan merupakan suatu persoalan yang sangat menentukan bagi perekonomian daerah atau Negara. Dengan cara ini, adalah kewajiban bersama, terutama bagi otoritas publik sebagai bantuan untuk metode yang terlibat dengan bekerja pada kehidupan individu di pemerintahan, untuk segera melacak rencana keluar sebagai pekerjaan untuk mengurangi kebutuhan. Dampak dari upaya pengurangan kemiskinan di Sumatera Barat memiliki hasil yang konstruktif. Hal ini terlihat dari angka kemiskinan yang mengalami desain yang semakin menurun.

Tabel 1.1 Kabupaten/Kota di provinsi Sumatera Barat yang di peroleh dari badan pusat statistic Sumatera Barat(BPS Sumbar) menjelaskan bahwa jumlah penduduk miskin di provinsi Sumatera Barat mengalami penurunan dari tahun 2015 hingga tahun 2019.



Gambar 1.1 Persentase penduduk miskin di Sumatera Barat tahun 2015-2019 dalam satuan persen

Sumber: Badan Pusat Statistik Sumatera Barat (BPS Sumbar)

Adanya penurunan tingkat kemiskinan pada suatu wilayah mengindikasikan bahwa pembangunan yang dilaksanakan telah membawa sebuah keberhasilan. Ketika perekonomian berkembang di suatu kawasan (negara atau kawasan tertentu yang lebih kecil), terdapat lebih banyak pendapatan untuk dibelanjakan, yang jika terdistribusi dengan baik diantara penduduk di kawasan tersebut akan mengurangi kemiskinan. Dengan kata lain, secara teoritis pertumbuhan ekonomi memainkan peranan penting dalam mengatasi penurunan kemiskinan (Kuncoro, 2004)

Pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan tidak fenomena yang terpisah, tetapi fenomena yang sama dengan dua wajah dan pertumbuhan ekonomi itu memiliki dampak positif pada pengurangan kemiskinan tetapi tidak secara default. Jadi, efek menetes ke bawah tanpa adanya dampak pro-kaum miskin tidak memiliki dukungan ilmiah yang lebih kuat (Škare & Družeta, 2016)

Dengan pertumbuhan ekonomi berkembang setiap tahun, dapat dikatakan bahwa kemajuan berkembang. Sesuai analisis pasar, Arsyad (2004), pertumbuhan ekonomi dicirikan sebagai peningkatan Produk Domestik Bruto, apakah peningkatan tersebut lebih menonjol atau tidak persis dengan laju perkembangan penduduk, atau terjadi atau tidaknya perubahan dalam konstruksi moneter. Spekulasi (modal), kemelaratan dan pembangunan keuangan saling terkait. Sulit bagi otoritas publik untuk membuat posisi baru tanpa perkembangan moneter yang tinggi. Sama

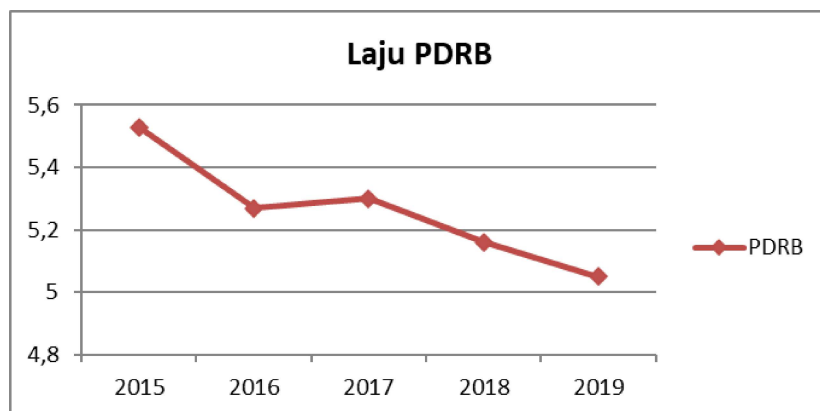
sulitnya untuk membuka pintu bisnis bagi orang miskin (jaringan lingkungan) dengan asumsi pembangunan keuangan hanya ditopang oleh latihan penciptaan dan membutuhkan tenaga kerja pendidikan lanjutan. Dimana sebagian besar masyarakat miskin berada di luar pendidikan dasar (SD) atau belum menyelesaikan sekolah dasar

Pembangunan ekonomi dan kemiskinan merupakan petunjuk penting bagi tercapainya pergantian peristiwa suatu bangsa. Setiap negara akan berusaha untuk mencapai pembangunan ekonomi yang ideal dan mengurangi kebutuhan. Di banyak negara di planet ini, kondisi utama untuk penurunan kemiskinan adalah pembangunan keuangan. Namun, kondisi di negara-negara non-industri, termasuk Indonesia, yang telah mencapai perkembangan finansial juga dibarengi dengan maraknya persoalan jumlah penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan. (Jonaidi, 2012)

Perkembangan pertumbuhan ekonomi dapat menunjukkan sejauh mana pertumbuhan ekonomi akan menghasilkan pembayaran ekstra untuk daerah setempat dalam periode tertentu. Dengan demikian, tindakan finansial pada dasarnya adalah suatu proses pemanfaatan variabel untuk menciptakan hasil, kemudian pada saat itu siklus penciptaan akan memberikan suatu perkembangan kompensasi atas faktor-faktor penciptaan yang dimiliki oleh daerah setempat.

Tolak ukur yang digunakan dalam perkembangan pertumbuhan ekonomi adalah laju perkembangan Gross Local Homegrown Item

(PDRB). Ada beberapa alasan yang menentukan keputusan pembangunan keuangan dengan menggunakan Gross Local Homegrown Item (PDRB) daripada penanda lain, termasuk PDRB adalah seberapa besar nilai tambah yang diciptakan oleh kegiatan Penciptaan dalam perekonomian, ini meningkatkan kenaikan PDRB juga mencerminkan ekspansi sebagai kompensasi atas faktor-faktor penciptaan ini. . Di dalam luas wilayah, pengertian pembangunan moneter teritorial disamakan dengan pembangunan keuangan publik, hanya saja luas atau lokalnya direduksi menjadi di dalam wilayah-wilayah tertentu dan disesuaikan dengan iklim fungsionalnya, seperti wilayah, kota atau wilayah. (Pangiuk, 2018)



Gambar 1.2 Laju PDRB Sumatera Barat tahun 2015-2019

Sumber: Badan Pusat Statistik Sumatera Barat (BPS Sumbar)

Menurut Badan Pusat Statistik, laju pengembangan Produk Domestik Wilayah Bruto dicirikan sebagai jumlah atau nilai tambah yang diklaim oleh semua unit khusus yang terletak di wilayah tertentu atau merupakan nilai total tenaga kerja dan produk tertentu yang dikirimkan oleh setiap unit keuangan. Berdasarkan Gambar 1.2 dapat diketahui bahwa laju pertumbuhan PDRB Sumatera Barat mengalami fluktuasi setiap

tahunnya. Pada tahun 2015 laju pertumbuhan PDRB tertinggi dengan nilai 5,53% sedangkan laju pertumbuhan PDRB terendah diperoleh pada tahun 2019 yaitu sebesar 5,05%.

Pertumbuhan ekonomi menunjukkan sejauh mana aktivitas perekonomian akan menghasilkan tambahan pendapatan masyarakat pada suatu periode tertentu. Perekonomian dianggap mengalami pertumbuhan bila seluruh balas jasa riil terhadap penggunaan factor produksi pada tahun tertentu lebih besar daripada tahun sebelumnya. Indikator yang digunakan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi adalah tingkat pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) berdasarkan harga konstan (Chalid & Yusuf, 2014)

Menurut Tambunan (2001) pertumbuhan ekonomi tanpa dibarengi menggunakan penambahan kesempatan kerja akan menyebabkan ketimpangan pada pembagian menurut penambahan pendapatan tersebut (*ceteris paribus*), yg selanjutnya akan membentuk suatu syarat pertumbuhan ekonomi menggunakan peningkatan kemiskinan.

Kualitas sumber daya manusia juga dapat menjadi faktor penyebab terjadinya penduduk miskin. Kualitas sumber daya manusia dapat dilihat dari indeks kualitas hidup/indeks pembangunan manusia. Rendahnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) akan berakibat pada rendahnya produktivitas kerja dari penduduk. Produktivitas yang rendah berakibat pada rendahnya perolehan pendapatan. Sehingga dengan rendahnya pendapatan menyebabkan tingginya jumlah penduduk miskin. Berikut

adalah perkembangan dan pertumbuhan kualitas sumber daya manusia pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat yang diukur dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

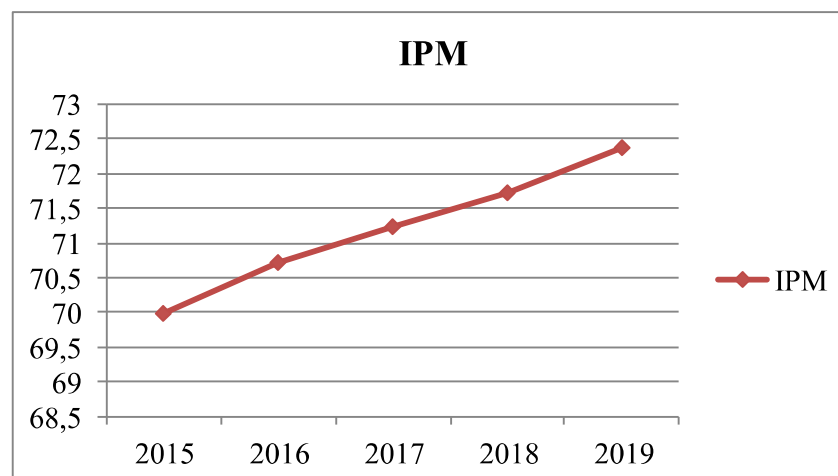
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan pengukuran perbandingan dari harapan hidup, pendidikan, dan standar hidup untuk semua negara. IPM digunakan sebagai indikator untuk menilai aspek kualitas dari pembangunan dan untuk mengklasifikasikan apakah sebuah negara termasuk negara maju, negara berkembang, atau negara terbelakang dan juga untuk mengukur pengaruh dari kebijakan ekonomi terhadap kualitas hidup. (Direktorat Analisis dan Pengembangan Statistik BPS, 2015).

Banyak faktor yang mempengaruhi kemiskinan. Studi empiris tentang Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan pendapatan per kapita memiliki sangat berpengaruh terhadap pengurangan kemiskinan. Pengaruh IPM dan pendapatan per kapita pada pengurangan kemiskinan ditemukan signifikan dan dampak IPM terhadap kemiskinan adalah negatif. Selain itu, belajar dari Arief dan Pratiwi (2017) menyimpulkan bahwa indikator IPM memiliki nilai negatif hubungan dan pengaruh yang signifikan terhadap pengurangan kemiskinan secara statistik (Amaluddin et al., 2018)

Indeks pembangunan manusia, yang merupakan gambaran tingkat kualitas manusia, berperan penting dalam mengurangi peningkatan. Perbedaan pada kesempatan untuk berubah menjadi individu yang utuh, baik secara intelektual, tulus, dan logis, merupakan modal penting bagi

suatu negara untuk keluar dari kemiskinan. IPM yang merupakan alat penaksir sifat pergantian peristiwa manusia, merupakan variabel penting bagi suatu bangsa dalam mengurangi kebutuhan juga berpengaruh buruk terhadap tingkat kemiskinan sehingga tingkat kebutuhan akan semakin tinggi, hal ini sesuai dengan hipotesis bahwa IPM mencerminkan sifat tingkat pergantian manusia Indonesia. Tingkat human improvement list yang merupakan batasan untuk menata negara yang berevolusi, mencipta, atau belum matang, merupakan salah satu elemen penyebab kemiskinan di Indonesia. (Pratama, 2015)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dihitung berdasarkan data yang dapat menggambarkan keempat komponen yaitu capaian umur panjang dan sehat yang mewakili bidang kesehatan, angka melek huruf, partisipasi sekolah dan rata-rata lamanya sekolah mengukur kinerja pembangunan bidang pendidikan dan kemampuan daya beli masyarakat terhadap sejumlah kebutuhan pokok yang dilihat dari rata-rata besarnya pengeluaran perkapita sebagai pendekatan pendapatan (Chalid & Yusuf2014)



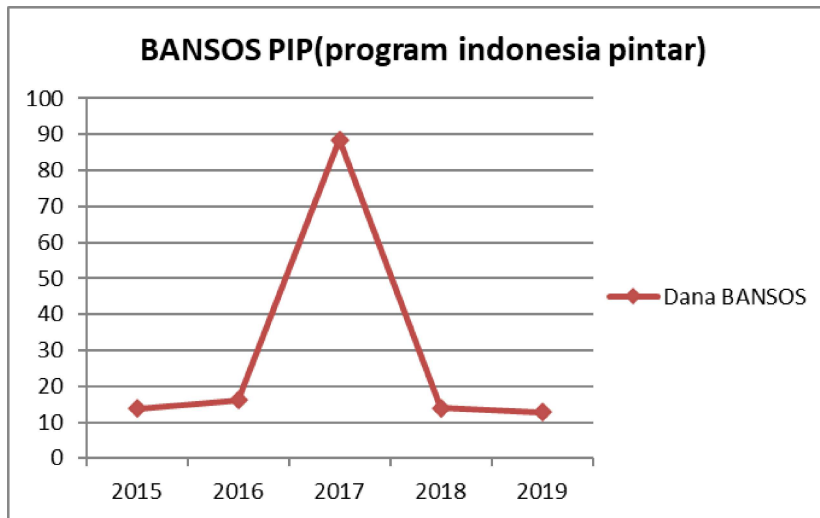
Gambar 1.3 Persentase IPM Sumatera Barat Tahun 2015- 2019
Sumber: Badan Pusat Statistik Sumatera Barat (BPS Sumbar)

Pembangunan manusia dapat diukur dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau Human Development Index (HDI) yang merupakan suatu indeks komposit untuk mengukur pencapaian kualitas pembangunan manusia. Todaro (2011) mengatakan Indeks pembangunan manusia adalah indeks yang mengukur pencapaian pembangunan sosio-ekonomi suatu negara, yang mengombinasikan pencapaian dibidang pendidikan, kesehatan, dan pendapatan riil per kapita yang disesuaikan. Ketika Indeks Pembangunan Manusia meningkat, maka produktivitas penduduk tersebut juga akan meningkat sehingga hal tersebut dapat menjadi faktor untuk meningkatkan kesejahteraan di daerah tersebut. Indeks Pembangunan Manusia mencakup tiga komponen yaitu pendidikan, kesehatan dan standar hidup yang layak

Dari Gambar 1.3 dilihat dari setiap tahun di Provinsi Sumatera Barat Indeks Pembangunan Manusia (IPM) selalu mengalami peningkatan dari tahun 2015 hingga 2019 Indeks Pembangunan Manusia di Sumatera Barat karena sudah melewati rentang kategori tinggi di angka 70. Hal tersebut diduga terjadi peningkatan yang positif di Sumatera Barat indikator yang digunakan dalam mengukur indeks pembangunan manusia adalah hidup sehat, harapan sekolah/pendidikan maupun indikator hidup layak/ekonomi.

Pada saat otonomi Indonesia, otoritas publik sekitar saat itu benar-benar fokus pada kebutuhan di mata publik. Hal ini harus terlihat dari pedoman dalam UUD 1945 (sebagai premis super hukum di bidang regulasi di Indonesia) Pasal 34 dan Pasal 27 ayat (2). Pasal 34 yang memuat “orang miskin dan anak-anak yang diberhentikan benar-benar menjadi perhatian negara”. Dan Pasal 27 ayat (2) memuat “Setiap penduduk berhak untuk bekerja dan penghidupan yang terhormat bagi umat manusia.” Berdasarkan pasal-pasal tersebut, otoritas publik kemudian, pada saat itu, membuat pedoman yang berhubungan dengan mitigasi kebutuhan di berbagai bidang (Barlinti, 2007)

Berbagai kebijakan dan program pemerintah selama ini telah dilaksanakan dalam rangka menanggulangi kemiskinan di Indonesia, antara lain: Inpres Desa Tertinggal (IDT), Bantuan Langsung Tunai (BLT), Program Pengembangan Kecamatan (PPK), Program Indonesia pintar (PIP), Program Raskin dan Subsidi BBM, serta Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP) (Aneta, 2012)



Gambar 1.4 Persentase Rumah tangga Penerima BANSOS PIP (Program Indonesia Pintar) Kabupaten/Kota di Sumatera Barat tahun 2015-2019

Sumber: Badan Pusat Statistik Sumatera Barat (BPS Sumbar)

Bansos PIP (program Indonesia pintar) merupakan suatu kebijakan pemerintah yang di ukur dalam pengentasan kemiskinan, data persentase rumah tangga penerima Bansos di sumatera Barat

Gambar 1.4 memperlihatkan data bantuan sosial PIP(Program Indonesia pintar) yang di peruntukan untuk masyarakat miskin di Kabupaten/Kota di provinsi Sumatera Barat, pada tahun 2015 hingga tahun 2017 mengalami kenaikan, yaitu pada tahun 2015 berjumlah 13,79%, tahun 2016 berjumlah 19,58%, dan 2017 berjumlah 88,43% Namun pada tahun 2018 hingga 2019 mengalami penurunan yang drastis, yaitu pada tahun 2018 berjumlah 13,98% dan 2019 berjumlah 12,71%. Program bansos PIP yang paling banyak yaitu pada tahun 2017 yang berjumlah 88,43%. Jadi persentase masyarakat miskin penerima PIP (program Indonesia Pintar) mengalami penurunan drastis dari tahun 2017

hingga tahun 2019, ini memperlihatkan bahwa provinsi Sumatera Barat tingkat kemiskinan sudah mulai membaik dari tahun 2017 hingga 2019 yang di lihat pada tabel bahwasanya penerima bantuan sosial PIP sudah berkurang.

Dana alokasi pemerintah terhadap pengentasan kemiskinan menurut Kuncoro (2015) di dalam UU NO.17 Tahun 2003, di sebutkan bahwa keuangan negara merupakan semua hak dan kewajiban negara yang dapat di nilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang atau barang yang dapat di jadikan milik negara berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut (Management, 2016)

Dari latar belakang diatas, maka Pertumbuhan Ekonomi, Indeks Pembangunan Manusia, dan Kebijakan Pemerintah Terhadap Tingkat Kemiskinan di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat adalah masalah ekonomi yang sangat membingungkan dan merupakan usaha publik yang harus diurus oleh pemerintah lokal atau pusat. Dengan cara ini, ternyata sangat terbayang untuk mengetahui keadaan kemiskinan, dan bagaimana dampak pembangunan ekonomi, indeks pembangunan manusia (IPM), dan kebijakan pemerintah terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten/Kota wilayah Sumatera Barat, Oleh sebab itu penelitian ini bermaksud untuk menganalisis kondisi tersebut dengan mengambil judul penelitian “Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Indeks Pembangunan Manusia, dan Kebijakan Pemerintah Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Provinsi Sumatera Barat”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan, maka rumusan masalah pada penelitian ini yaitu:

1. Sejauh mana pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap kemiskinan di Sumatera Barat.
2. Sejauh mana pengaruh indeks pembangunan manusia terhadap kemiskinan di Sumatera Barat.
3. Sejauh mana pengaruh kebijakan pemerintah terhadap kemiskinan di Sumatera Barat.

C. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah dapat kita ketahui tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap kemiskinan di Sumatera Barat
2. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh indeks pembangunan manusia terhadap tingkat kemiskinan di Sumatera Barat
3. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh kebijakan pemerintah terhadap faktor pertumbuhan ekonomi di Sumatera Barat.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi penulis, merupakan salah satu syarat dalam menyelesaikan program strata satu pada Jurusan Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang
2. Sebagai masukan bagi pemerintah dalam mengambil keputusan atau kebijakan terhadap kesejahteraan masyarakat di Indonesia
3. Diharapkan menjadi bahan masukan bagi peneliti selanjutnya yang ingin meneliti secara lebih mendalam dari masalah yang belum terungkap.

BAB II

KAJIAN TEORI, KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS

A. Kajian Teori

1. Kemiskinan

kemiskinan tetap menjadi problem serius bagi berbagai pemerintahan di dunia ketiga, termasuk Indonesia. Hampir satu dekade lalu, pada 2005, kejadian busung lapar terjadi di Nusa Tenggara Barat. Kejadian ini menguudang prihatinan banyak pihak dan pemerintah menetapkan5ra sebagai kejadian luar biasa (KIB). Di Yahukimo, Papua, juga terjadi bencana yang sama. Ironi ini terjadi di tengah asumsi besar yang terus menerus dibangun bahwa Indooesia adalah negara kaya raya dengan sumber alam yang melimpah (Nur, n.d.)

Secara umum kemiskinan merupakan masalah yang sangat kompleks, karena tidak hanya berkaitan dengan masalah rendahnya pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari, rendahnya pendapatan masyarakat tetapi juga ketidakberdayaan dari aspek ekonomi, social, budaya dan politik (Atma Ras, 2013).

Menurut Kholis. N (2014), Isunya adalah isu filantropi yang telah mendunia dan masih menjadi isu utama di wilayah manapun di planet ini. Selain bersifat lembam dan nyata, kemelaratan adalah penyakit keuangan yang sering dialami oleh negara-negara agraris. Ada dua kondisi yang menyebabkan terjadinya kemelaratan, yaitu kemelaratan dan kemiskinan palsu. Kemiskinan normal terjadi karena terbatasnya aset reguler (SDA),